

STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nila Wardani

NPP 31.0600

Asdaf Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nila27052017@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the existence of street children who 99% consume drugs and become victims of street violence. The problem of the existence of street children in Pontianak City and the dangers they face show the need for guidance by social services so that street children do not return to the streets. When conducting social service coaching, it is necessary to determine the right strategy so that coaching is more optimal. **Purpose:** This research aims to describe and analyze the strategy of social services in fostering street children in Pontianak City, West Kalimantan Province, inhibiting factors, and efforts in overcoming obstacles in fostering street children by the Pontianak City Social Service, West Kalimantan Province. **Method:** This research uses Jack Kooten's theory (in Salusu: 1996) which examines strategy into four dimensions, namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The approach taken in this research is descriptive qualitative using inductive analysis. **Result/Finding:** Findings that the Pontianak City Social Service collaborates with several stakeholders in providing guidance to street children, but the sports facilities at PLAT are still not good. **Conclusion:** The results of the research show that the strategy of the Pontianak City Social Service in developing street children in Pontianak City, West Kalimantan Province is not optimal. There are several obstacles in the form of an unclear vision and mission, no legal umbrella regarding Shelter Homes, limited budget, lack of human resources, and lack of facilities and infrastructure. The efforts made to overcome obstacles are implementing the Pontianak City Government's vision and mission in accordance with its duties

and functions, proposing the establishment of a legal umbrella regarding Shelter Homes, carrying out cost-free and efficient cooperation on the reunification of street children, giving more workload to employees, and submitting requests facilities and infrastructure to the city government.

Keywords: Strategy, Social Service, Street Child Development



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan anak jalanan yang 99% mengonsumsi narkoba dan menjadi korban kekerasan jalanan. Masalah keberadaan anak jalanan di Kota Pontianak dan bahaya yang mereka hadapi menunjukkan perlunya pembinaan oleh dinas sosial agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalanan. Dalam melakukan pembinaan dinas sosial perlu menentukan strategi yang tepat agar pembinaan lebih optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, faktor penghambat, dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** penelitian ini menggunakan teori Jack Kooten (dalam Salusu: 1996) yang mengkaji strategi menjadi empat dimensi yaitu Strategi organisasi, Strategi program, Strategi pendukung sumber daya, dan Strategi kelembagaan. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis induktif. **Hasil/Temuan:** Temuan bahwa Dinas Sosial Kota Pontianak bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan, namun sarana olahraga di PLAT masih kurang baik. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Pontianak dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Terdapat beberapa hambatan berupa visi misi yang belum jelas, belum ada payung hukum tentang Rumah Singgah, keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, dan kurangnya sarana dan prasarana. Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah melaksanakan visi misi Pemerintah Kota Pontianak dengan disesuaikan dengan tugas dan fungsi, mengajukan pembentukan payung hukum tentang Rumah Singgah, melakukan kerja sama tanpa biaya dan efisiensi reunifikasi anak jalanan, pemberian beban kerja lebih kepada pegawai, dan mengajukan permintaan sarana dan prasarana kepada pemerintah kota.

Kata Kunci : Strategi, Dinas Sosial, Pembinaan Anak Jalanan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting bagi kemajuan Indonesia, sudah seharusnya anak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan juga perhatian baik dari orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Namun, yang terlihat di lapangan masih banyak ditemukan anak-anak yang berkeliaran di jalanan untuk berjualan atau mengamen dengan sebagian besar sudah putus sekolah dengan alasan ekonomi. Anak-anak tersebut dikenal dengan sebutan anak jalanan. Menurut UNICEF anak jalanan umumnya berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pada tahun 2022 masih terdapat sekitar 67.368 anak jalanan di Indonesia dan masih ada kemungkinan anak jalanan yang belum terdata karena bersembunyi.

Keberadaan anak jalanan di Kota Pontianak terlihat di beberapa jalan raya, seperti di Jl. Ahmad Yani, Jl. Tanjung Raya, Jl. Imam Bonjol, di simpang tol Jl. Gajah Mada, persimpangan antara Jl. Veteran dan Jl. Gajah Mada. Berdasarkan hasil razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diperoleh data pada tahun 2020 terdapat enam anak jalanan, tahun 2021 mengalami peningkatan drastis menjadi 27 anak jalanan, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 19 anak jalanan, dan jumlah tersebut konstan pada tahun 2023 sehingga terdapat 19 anak jalanan yang ada di Kota Pontianak. Meskipun jika dibandingkan dengan jumlah anak di Kota Pontianak yang berjumlah 157.014 anak, jumlah anak jalanan terbilang tidak cukup banyak. Namun, yang menjadi urgensi perlunya penanganan anak jalanan adalah 99% anak jalanan berdasarkan hasil tes urine positif mengonsumsi narkoba akibat dari pergaulan bebas di jalanan, bahkan ditemukan anak jalanan yang hamil dan setelah melahirkan, kembali meminta-minta di jalanan. Kemudian pada tahun 2022 terdata sebanyak 5 kasus anak jalanan di Kota Pontianak yang mengalami kekerasan seksual, dan 2 kasus anak jalanan yang mengalami kekerasan psikis dan mental. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan agar anak jalanan dapat lebih aman dan memperoleh haknya dalam melanjutkan hidup. Menurut Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik

Menurut Eva dan Sutiyo pemerintah berkewajiban memberi perlindungan kepada masyarakat, baik hidup, keselamatan, penghidupan, harga diri, dan nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam

mengatasi masalah ini adalah dinas sosial. Adapun bentuk pembinaan dan pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak melalui Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) di Jalan Ampera No. 6, Sungai Jawi di belakang Polsek Pontianak Kota ialah pembinaan dengan mengikuti kegiatan olahraga, layanan konseling atau psikolog, layanan keagamaan sesuai agama masing-masing, pembinaan keterampilan, dan pembinaan mental, serta layanan kesehatan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penertiban anak jalanan sudah secara rutin dilakukan setiap hari yang di bagi menjadi dua *shift* yaitu *shift* pagi dan *shift* sore. Pembinaan anak jalanan juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak, namun masih saja ditemukan anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas di persimpangan jalan Kota Pontianak hal ini dibuktikan dengan jumlah anak jalanan yang tidak menurun pada tahun 2022 dan 2023 yang tetap sejumlah 19 anak jalanan. Pola pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak yang kurang menekankan pada tanggung jawab dan kemandirian kepada anak jalanan sehingga belum muncul efek jera untuk tidak kembali ke jalanan. Kemudian bimbingan keterampilan yang kurang optimal karena belum menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Pontianak menjadi permasalahan yang perlu dipikirkan pula. Proses reunifikasi sosial juga perlu difokuskan dan didampingi lebih dalam lagi agar diketahui bagaimana pola perlakuan keluarga terhadap anak jalanan.

Kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pontianak karena kurangnya kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terkait serta kurangnya dana sehingga pelatihan keterampilan dan penambahan fasilitas olahraga menjadi terhambat. Solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kurang optimalnya pembinaan yang diberikan adalah dengan mengambil sikap tegas dan mencari tahu serta menyusun strategi dalam pembinaan anak jalanan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi inspirasi dalam menulis materi terkait strategi maupun pembinaan anak jalanan oleh dinas sosial. Penelitian Yudha Pratama berjudul Peranan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kisaran Kabupaten

Asahan (Pratama, Muhammad Yudha: 2022) membahas peran dinas sosial dalam melakukan pembinaan non panti kepada anak jalanan dan menjelaskan hambatan yang dimiliki berupa keterbatasan dana dan kesadaran anak jalanan yang masih kurang. Penelitian Besse membahas tentang implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar menemukan bahwa pembinaan anak jalanan dari segi organisasi dan aplikasi sudah cukup baik namun masih memiliki hambatan berupa kurangnya tempat pembinaan bagi anak jalanan (Erniati, Besse: 2019). Penelitian Surya menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan terhambat karena belum adanya panti asuhan milik pemerintah membuat dinas sosial harus menumpang dengan panti asuhan milik swasta sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar (Pratama, Surya Hadi: 2021). Sejalan dengan penelitian Surya, penelitian Ani memiliki faktor penghambat dalam pembinaan anak jalanan yaitu tidak adanya panti asuhan yang dimiliki pemerintah kota Bandar Lampung sehinggga biaya yang di keluarkan oleh dinas sosial cukup besar (Yan, Ani Aminah: 2021). Penelitian Ramadhani, dkk menemukan bahwa kendala dalam pembinaan anak jalanan adalah setelah melakukan pembinaan, anak jalanan cenderung kembali ke jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi (Ramadhani, M. dkk: 2016). Penelitian Thariq, dkk menjelaskan bahwa strategi yang diberikan dalam pembinaan anak jalanan adalah *Support Group* (Riawan, Thariq. dkk: 2024). Selanjutnya, berdasarkan penelitian Lili dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam pembinaan anak jalanan adalah belum adanya tempat rehabilitasi untuk menampung anak jalanan (Ling, Lili: 2023). Penelitian Ongky menemukan bahwa pemerintah Kota Surabaya membentuk UPTD Kampung Anak Negeri sebagai tempat pembinaan bagi anak jalanan (Mahardi, Ongky Karisma: 2018). Penelitian yang dilakukan Syamsul menunjukkan bahwa pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial masih memiliki keterbatasan, seharusnya dinas sosial memiliki panti rehabilitasi sendiri agar dinas sosial dapat berkontribusi penuh dalam pembinaan dan pembentukan program pembinaan lanjutan juga diperlukan (Arifin, Syamsul: 2017). Kemudian Syaharuddin, dkk menemukan bahwa pembinaan anak jalanan dilakukan dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan (Syahrudin, dkk:2021). Penelitian Fini menjelaskan bahwa terdapat dua kebijakan yang dilakukan dalam pembinaan anak jalanan yaitu program penertiban dan sosialisasi dan pelatihan keterampilan (Harefa, Fini Saulinaria: 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaharuan atau *novelty* dari penelitian ini adalah penelitian ini belum pernah dilakukan terutama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian penelitian ini memiliki fokus pembahasan tentang bagaimana strategi yang dilakukan dinas sosial dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan dengan menggunakan teori dari Jack Kooten (dalam Salusu: 1996). Teori ini menganalisis strategi melalui empat tipe yaitu, strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, faktor penghambat, dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis induktif dengan berpedoman pada Sugiyono. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 10 informan dari kepala dinas, kepala bidang, kepala administrasi, pegawai dinas sosial, pekerja sosial, anak jalanan, dan perangkat terkait, observasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak dan PLAT, dan dokumentasi kegiatan pembinaan dan hal terkait. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis data yang berpedoman pada Model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

III. Hasil dan Pembahasan

Peneliti menganalisis strategi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Kooten (dalam Salusu: 1996). Hal ini bertujuan untuk memperjelas topik permasalahan dan mengukur strategi yang telah dilakukan. Berikut adalah pembahasannya:

3.1 Strategi Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi meliputi visi misi dan inovasi dari sebuah organisasi atau lembaga. Dinas Sosial Kota Pontianak belum memiliki visi misi yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi masalah sosial terutama anak jalanan yang ada di Kota Pontianak. Hal ini tentunya menjadi kelemahan dengan belum terbentuknya visi dan misi yang mengarah pada upaya Dinas Sosial Kota Pontianak dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan sehingga kinerja yang diberikan belum optimal karena visi misi yang belum jelas. Inovasi yang diberikan dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan adalah pemberian keterampilan menanam sayur, membuat kerajinan tangan dari bahan bekas, dan pengembangan SLRT sebagai bentuk bantuan agar anak tidak perlu bekerja di jalanan. Hamabatan yang ditemukan adalah belum adanya payung hukum tentang rumah singgah, sehingga inovasi yang sedang diusahakan adalah pembentukan payung hukum khusus tentang rumah singgah.

2. Strategi Program

Strategi program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dilakukan melalui beberapa program seperti bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan spiritual, dan sosial serta program pelatihan keterampilan. Selain itu, adanya proses sosialisasi dan reunifikasi juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Namun, dalam pelaksanaannya hanya memiliki alokasi sejumlah Rp.22.192.800 untuk 1 tahun, jumlah tersebut masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal.

Pada penetapan program, Dinas Sosial Kota Pontianak melaksanakan program bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta melaksanakan sosialisasi. Program tersebut menargetkan bahwa dampak program pembinaan anak jalanan dirasakan oleh anak jalanan, orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, diharapkan mereka justru membantu pencegahan keberadaan anak jalanan mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, RT/RW, dan pertemanan. Namun, dampak tersebut belum dirasakan

secara maksimal karena keterbatasan dana sehingga sosialisasi menjadi terhenti.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Sumber daya manusia pada dinas sosial masih banyak yang belum menempuh perkuliahan khususnya pada ilmu sosial, kemudian untuk meningkatkan pelayanan dinas sosial melakukan kerja sama dengan Polsek Pontianak Kota dalam hal pengamanan dan menangani anak yang mengonsumsi narkoba, dan bekerja sama dengan Puskesmas Karya Mulya dalam hal kesehatan anak jalanan. Anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan pembinaan anak jalanan sebesar Rp. 22.912.800 dalam kurun waktu 1 tahun. Tidak jarang suatu lembaga telah menyusun suatu program namun pelaksanaannya terhambat karena keterbatasan dana. Pengefektifan tenaga kerja yang ada merupakan langkah dalam mengoptimalkan dana yang ada, karena pekerja sosial atau relawan sosial maupun petugas dari dinas sosial dituntut untuk dapat melakukan bimbingan fisik, bimbingan mental, spiritual, dan sosial. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan karena bimbingan yang diberikan tentunya tidak sebaik dengan yang diberikan oleh orang yang menguasai suatu bidang. Sarana dan prasarana yang dimiliki dinas sosial sudah cukup baik meskipun masih terdapat komputer dan motor yang rusak, kemudian fasilitas olahraga pada PLAT juga perlu ditambah, serta tempat tidur anak jalanan juga kurang nyaman.

4. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan ialah strategi yang berasal dari lembaga yang berkaitan dengan inisiatif untuk menghadapi permasalahan bersama lembaganya, yang berkaitan dengan kewenangan dan standar operasional prosedur. Kewenangan dinas sosial di bidang sosial meliputi sistematika kebijakan mulai dari perumusan sampai dengan pelaporan. Dalam pembinaan anak jalanan berwenang memberikan bimbingan sesuai PERWALI Kota Pontianak Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Sosial selama 7 hari di luar panti. SOP pembinaan anak jalanan dilakukan mulai dari proses razia, asesmen, dan pembinaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian bimbingan. Pemahaman setiap pegawai dinas sosial terhadap SOP pembinaan sudah cukup baik meskipun masih dapat ditingkatkan agar lebih memahami secara mendalam

3.2 Faktor Penghambat Strategi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pontianak

Pelaksanaan strategi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak memiliki beberapa hambatan, yaitu:

1. Belum Adanya Visi Misi Dinas Sosial Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat: Dinas Sosial Kota Pontianak menjalankan strategi organisasi dengan mengacu pada visi dan misi Kota Pontianak. Visi dan misi tersebut masih terlalu umum dan belum mengarah kepada penanganan masalah sosial khususnya penanganan atau pembinaan anak jalanan.
2. Belum Memiliki Payung Hukum Khusus tentang Rumah Singgah: PERWALI Kota Pontianak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak hanya mengatur tentang struktur organisasi dinas sosial secara umum, sehingga banyaknya urusan yang ditangani oleh Kepala Dinas membuat mekanisme kerja menjadi lambat.
3. Anggaran yang Terbatas: Kurangnya anggaran dalam pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat dari alokasi dana tahunan untuk program pembinaan yang hanya sejumlah Rp. 22.912.800. Dana tersebut belum cukup untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Keterbatasan sumber daya aparatur yang bertugas melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dibuktikan dengan jumlah pekerja sosial yang hanya 4 orang dan ditambah dengan 3 relawan sosial yang bekerja secara tidak terikat.
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana: Terlihat dari adanya komputer dan motor yang rusak kemudian fasilitas olahraga masih sedikit dan tempat tidur yang kurang nyaman.

3.3 Upaya Dinas Sosial dalam Mengatasi Hambatan dalam Strategi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pontianak

1. Melaksanakan visi dan misi Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak: Meskipun Dinas Sosial Kota Pontianak belum memiliki visi dan misi secara khusus, maka Dinas Sosial Kota

Pontianak menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada visi dan misi Kota Pontianak.

2. Melakukan Pengajuan Pembentukan Payung Hukum tentang Rumah Singgah: membentuk payung hukum atau aturan khusus tentang Rumah Singgah agar struktur organisasi lebih jelas dan dapat melaksanakan pembinaan lebih efektif dan efisien.
3. Melakukan Kerjasama dan Efisiensi Reunifikasi: Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak seperti RSUD Soedarso, Puskesmas Karya Mulya untuk menangani masalah Kesehatan. Kemudian, proses reunifikasi anak jalanan juga dilakukan secara terpusat di suatu titik untuk menekan biaya transportasi.
4. Pemberian Beban Kerja Lebih Kepada Pegawai: Menghadapi hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melibatkan anggota dinas sosial di bidang pelayanan umum dan rehabilitasi sosial untuk membina dan mengawasi kegiatan anak jalanan.
5. Mengajukan Permintaan Sarana Prasarana Tambahan: Kurangnya sarana dan prasarana penting perlu dilakukan pengajuan permintaan kepada pemerintah kota dengan alasan dan detail atau laporan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar anak jalanan menjadi lebih semangat untuk berolahraga.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan otentik dan kebaharuan (*Novelty*) dari penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian: penelitian saat ini bertujuan untuk memperkuat dan sebagai tindak lanjut penelitian sebelumnya (Harefa, Fini Saulinaria: 2017) pada lokus yang berbeda. Penelitian Fini lebih berfokus pada faktor apa saja yang membuat anak jalanan berada di jalanan dan juga membahas strategi dinas sosial yang dijalankan dengan bekerja sama dengan Satpol PP.
2. Ruang Lingkup Penelitian: penelitian ini mencakup analisis yang lebih komprehensif, mencakup strategi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan. Penelitian sebelumnya (Pratama, Surya Hadi: 2021) membahas pembinaan secara umum tidak mengidentifikasi secara internal dinas sosial.

I. KESIMPULAN

Strategi Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pontianak melaksanakan visi dan misi Kota Pontianak, inovasi dalam pembinaan berupa pelatihan keterampilan dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu, dan pengembangan payung hukum tentang Rumah Singgah, program pembinaan berupa psikis, mental, spiritual, dan sosial termasuk sosialisasi yang berdampak pada anak jalanan, orang tua, dan masyarakat, bekerja sama dengan Polsek Pontianak Kota dan Puskesmas Karya Mulya sesuai bidangnya, dan melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan SOP. Namun, dalam pelaksanaannya menemukan beberapa hambatan yaitu visi misi dinas sosial yang belum jelas, belum ada payung hukum khusus tentang Rumah Singgah, kurangnya anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Keterbatasan Penelitian: penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian yang singkat dan biaya yang minim. Penelitian ini juga hanya dilakukan dengan mengambil sampel yang relatif kecil sehingga pandangan kurang menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

II. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

III. DAFTAR PUSTAKA

- Ernianti, Besse. 2019. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23883/>.
- Yan, Ani Aminah. 2021. Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/68172/>.
- Ramadhani, M. dkk. 2016. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/744>.
- Riawan, Thariq. dkk. 2024. Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang. <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/38>.
- Ling, Lili. 2023. Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30036/>.
- Mahardi, Ongky Karisma. 2018. Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). <https://core.ac.uk/download/pdf/151617267.pdf>.
- Pratama, M. Yudha. 2022. Peranan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Kisaran Kabupaten Asahan. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18234>.
- Pratama, Surya Hadi. 2021. Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/61898/>.
- Arifin, Syamsul. 2017. Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota bandar Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/2254/>.
- Harefa, Fini S. 2017. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8294>.

UNICEF. 2020. *Situasi Anak di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Eviany, Eva, & Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2020. *Analisis Pembinaan Organisasi*. Depok: Rajawali Pers.

